

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Politik Islam merupakan hasil dari berkembangnya sejarah agama Islam yang didasari oleh kitab suci Al-Quran dan juga hadist sebagai bentuk utama sumber hukum dan petunjuk didalam Islam. Banyak hal yang meliputi didalam nya seperti kepercayaan, hukum, ekonomi, sosial, serta politik. Dalam perkembangannya politik Islam terbagi pada tiga periode yang berbeda, yakni periode klasik, pertengahan, dan modern. Pada periode klasik dan pertengahan, negara-negara yang berbasis keyakinan Islam lebih terpaku pada ke-*khalifahan* yang sentris, mereka memiliki tujuan agar politik tetap stabil berada pada jalur penegakan hukum syariat Islam. Ketika memasuki era modern, politik Islam pun semakin beririsan dengan pemikiran politik barat. Banyak hal yang sedikit demi sedikit telah mempengaruhi negara-negara Islam dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, politik, kebudayaan, pemikiran, hingga teknologi.

Dalam perkembangan politik Islam yang ada, pemikiran tersebut pun memasuki Indonesia dan memiliki sejarah perjalanannya sendiri yang kompleks. Berawal dari zaman kolonial hingga setelah terjadinya reformasi, pemikiran politik Islam sudah melalui banyak perubahan dan juga telah beradaptasi dalam berbagai aspek seperti perubahan dalam segi sosial, ekonomi, hingga politik dalam negeri. Pada zaman kolonial, politik Islam merupakan satu bentuk perilaku melawan penjajahan dan penindasan yang terjadi di nusantara. Terdapat pula dua gerakan yang memiliki peranan penting pada masa itu dengan politik Islam nya,

yaitu Muhammadiyah (1912) dan Nahdathul Ulama (1926) dalam mempertahankan keberadaan Islam dibawah tekanan kolonial.

Dalam perkembangannya, Masyumi dan NU memiliki konflik internal hingga pada akhirnya keluarnya NU dari Masyumi. Pada pembentukannya, Masyumi menerapkan dua macam keanggotaan, yaitu perseorangan dan organisasi. NU menjadi salah satu anggota istimewa yang dimiliki Masyumi dan Kedudukan Majelis Syuro (pimpinan tertinggi) yang mempunyai wewenang menentukan kebijakan partai yang dipegang oleh tokoh NU yaitu KH. Hasyim Asy'ari sehingga NU cukup puas walaupun pimpinan partai didominasi oleh kelompok intelektual. Seiring berjalannya waktu akhirnya muncul lah perbedaan ketika masa kabinet Hatta terkait dengan perjanjian Ranville. Para tokoh pembaharu melihat bahwa masuk kedalam kabinet Hatta haram hukumnya, karena itu harus ditolak. Sedangkan NU yang disuarakan oleh KH. Wahab Hasbullah melihat justru karena melenyapkan munkarot itu harus masuk kedalam(Mukminin, 2015).

Perbedaan tipologi yang dimiliki kedua kelompok inilah yang menjadi salah satu penyebab keretakan antara keduanya. Masyumi memiliki pemikiran politik yang integral, sedangkan NU memiliki pemikiran politik yang moderat. Didalam pemikiran politik Islam sendiri terdapat tiga tipologi yang terbagi. Pertama adalah Integralistik, merupakan buah pemikiran yang lahir dari para sarjana Islam klasik, yang didalamnya menyatakan Islam dan politik merupakan satu hal yang menyatu dan tak dapat dipisahkan. Kedua, ialah sekulerisme merupakan sebuah prinsip yang dimana sering didefinisikan sebagai pemisahan antara negara dan agama. Ketiga adalah tipologi moderat, merupakan

seseorang/kelompok yang masuk dalam golongan tengah dari spektrum politik kiri-kanan. Tipologi ini menolak klaim ekstrim bahwa Islam adalah agama yang lengkap yang telah mengatur semua urusan termasuk urusan politik, tetapi juga menolak klaim ekstrim kedua yang melihat bahwa Islam tidak ada kaitannya dengan politik. Menurut tipologi ini, meskipun Islam tidak menunjukkan preferensinya pada sistem politik tertentu, tetapi di dalam Islam sendiri terdapat prinsip-prinsip moral atau etika bagi kehidupan bernegara, yang di dalam pelaksanaannya umat Islam bebas memilih sistem mana saja yang terbaik.

Memasuki zaman rezim orde baru politik Islam mengalami tiga fase hubungan yang pernah dialami umat Islam dan pemerintah orde baru menurut Abdul Aziz Thaba, yaitu: Antagonistik (1966-1981), Resiprokal-kritis (1981-1985), dan terakhir periode Akomodatif (1985-1998). Pada masa masa Antagonistik, yaitu masa awal dari bergejolaknya hubungan umat Islam dengan rezim orde baru. Soeharto melihat bahwa umat Islam khususnya para Kyai dari kalangan tradisional memiliki potensi yang berbahaya, sehingga gerakan mereka selalu diawasi, karenanya Soeharto lebih memilih memberikan kesempatan kepada Islam dalam hal ibadah seperti pembangunan mesjid, Zakat, dan Haji. Sedangkan untuk urusan muamalah seperti politik, dan mengangkat aspek hukum Islam sebagai asas dasar negara sangat dibatasi dan bahkan ditiadakan. Beralih ke masa transisional yang kedua, pada masa ini pergeseran mulai beralih kepada hubungan yang bersifat *legalistic-formal* dan berangsur-angsur melunak. Disamping itu dari arah kubu pemerintah pun ada komunikasi yang mulai membaik yang akhirnya menciptakan hubungan yang *reciprocalkritis*, dan pada fase ini umat Islam mulai bersikap akomodatif terhadap asas tunggal yang

disodorkan pemerintah sehingga munculah fase baru yang menandai harmonisnya hubungan umat Islam dan pemerintah Orde baru. Memasuki periode 1990-an bersifat akomodatif, hal ini ditandai dengan semakin responsifnya birokrasi Orde Baru terhadap Islam yang antara lain ditandai dengan lahirnya sejumlah kebijakan yang mengakomodasi aspirasi umat Islam, terutama dalam hal legislatif(Ruslan, 2019).

Satu dasawarsa pasca orde baru, tampilan kepemimpinan politik Islam di pentas nasional, terasa semakin jauh dari espektasi umat Islam di Indonesia; Yakni tampilnya kepemimpinan politik Islam yang ideal karena memiliki legitimasi, efektivitas kinerja, dan akuntabilitas kepemimpinan. Kepemimpinan dari kalangan politik Islam gagal memainkan peran utama dalam panggung yang mereka sendiri ikut membangunnya. Realitas tersebut, mengharuskan adanya re-afirmasi pemikiran politik Islam sebagai upaya menemukan jalan baru bagi relevansi dan kompatibilitas Islam dan demokrasi di Indonesia. Re-afirmasi tersebut merupakan perumusan visi strategis Islam tentang bangsa dan bagaimana partai dan cendikiawan Islam memposisikan diri dalam merespon masalah-masalah kebangsaan, juga bagaimana islam dapat menjalankan kegiatan politiknya berupa teori, praktek, landasan dan nilai-nilai islam dalam berpolitik(Jufri, 2018).

Dalam beberapa tahun terakhir, politik Islam menjadi politik identitas yang semakin menjadi sorotan di Indonesia ditambah lagi dengan era digital, berkembangnya teknologi dan sosial media. Isu-isu sensitif dan hangat untuk diperbincangkan terkait dengan Islam, seperti isu penistaan agama telah mempengaruhi dinamika perpolitikan dan sosial di Indonesia. Konsepsi politik

Islam yang ada di Indonesia jauh berbeda dengan negara mayoritas Muslim lainnya terutama yang berada di timur tengah. Indonesia sendiri merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, akan tetapi memiliki ciri khas politik Islam tersendiri.

Pada praktek nyatanya kelompok-kelompok politik Islam menggunakan jalur demokrasi untuk menyampaikan aspirasi konservatif mereka secara signifikan. Juga merefleksikan segala upaya peranan pemerintah sebagai faktor instrumental agar dapat memenuhi kepentingan serta kesejahteraan masyarakat, baik secara lahiriyah maupun batiniah. Kelompok yang ada yaitu seperti Front Pembela Islam, Hizbut Tahrir Indonesia, hingga elemen-elemen didalam Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah yang berupaya memperjuangkan aspirasi-aspirasi yang umumnya dianggap tidak demokratis.

Selama ini, politik Islam memiliki keterlibatan yang terbatas dalam prakteknya. Dalam sejumlah momen, kampanye-kampanye yang digaungkan kelompok-kelompok yang membawa politik Islam mengkampanyekan ide-ide yang dianggap bertentangan dengan demokrasi. Misalnya pada tahun 2013, pemimpin FPI yaitu Rizeq Shihab menolak ide pemilihan umum sembari mengingatkan bahwa bagi seorang muslim yang mendukung demokrasi sama buruknya seperti memakan daging yang diharamkan.

Dalam segi bidang politik, Indonesia memiliki partai-partai politik nasional yang menganut pandangan Islam sebagai bagian dari identitas politik mereka. Nama-nama seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional

(PAN), Partai Kebangkitan Umat (PKU), Partai Bulan Bintang (PBB), menganut pandangan Islam yang inklusif dan toleran. Meskipun partai-partai tersebut menganut pandangan Islam, tetapi mereka tetap mengikuti sistem politik yang ada di Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara. Partai-partai tersebut berjalan dalam kerangka negara yang pluralis dan mengakui keberagaman agama dan keyakinan.

Selain partai-partai Islam nasional yang sudah terlebih dahulu berkecimpung di dunia perpolitikan, Indonesia juga memiliki beberapa partai lokal yang berbasis di beberapa daerah, salah satunya ialah Aceh. Berbagai partai lokal yang muncul di Aceh rata-rata berlandaskan politik Islam dan berfokus pada penekanan penerapan hukum *syari'ah* dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan daerah. Partai-partai tersebut memiliki pandangan yang konservatif dan berusaha untuk mencerminkan identitas agama dan budaya Aceh yang mayoritasnya beragama Islam. Partai lokal yang terdapat di Aceh dibagi menjadi dua basis. Pada basis pertama adalah partai yang berbasis pada etno-nasionalisme yang dimana lahir dari proses konflik yang didalamnya berisikan Partai Aceh (PA), Partai Nanggroe Aceh (PNA), Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh (SIRA). Ketiganya memiliki hubungan dengan konflik Aceh, yang dihasilkan dari satu kompromi politik lewat perundingan perdamaian. Kemudian pada basis selanjutnya ialah Parlok yang berbasis keislaman/santri, yang didalamnya berisikan Partai Daerah Aceh (PDA), Partai Generasi Aceh Beusaboh Tha'at dan Taqwa (GABTHAT), dan juga terdapat partai baru yang didirikan yaitu Partai Adil Sejahtera (PAS).

Pada 10 November 2021, ulama Aceh menggelar Silaturahmi Ulama Aceh (SUA), yang menjadi pembahasan dalam pertemuan itu para ulama menyoroti ketimpangan politik Aceh yang hari ini mengalami disfungsi *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar* dalam praktik politik yang meresahkan para ulama di Aceh. Hasil dari pertemuan itu, lahirlah sebuah partai baru merupakan hasil dari ijtima' ulama yang juga berlandaskan pada politik Islam yaitu Partai Adil Sejahtera (PAS). Partai ini membawa warna baru didalam dunia perpolitikan lokal dan juga memberi kesan yang *fresh* terhadap masyarakat Aceh. Partai ini resmi dideklarasikan pada 22 Februari 2023, pernyataan lahirnya partai tersebut dibacakan langsung oleh Abuya Mawardi Waly al-Khalidy yang merupakan seorang Ulama Aceh. Partai Adil Sejahtera merupakan partai yang berbasis *dayah* yang memiliki visi yaitu *Amar Ma'ruf* dan *Nahi Mungkar* didalam politik. Partai PAS ingin mewujudkan model pemerintahan eksekutif dan legislatif yang adil dan memihak pada rakyat serta menjaga eksistensi agama. Partai Adil Sejahtera (PAS) Aceh ingin membawa negeri menuju menjadi negeri yang *Baldatun Thaibatun wa Rabbun Ghafur*

Terbentuknya PAS merupakan keprihatinan para ulama atas kondisi praktek politik yang ada di Aceh seperti pengambilan *fee* dan adanya *bouwherr* oleh anggota dewan. Otomatis melibatkan partai politik, karena yang melakukan pengambilan *fee* tersebut adalah para anggota dewan yang merupakan bagian dari partai-partai yang ada. Hal tersebut menjadi kegelisahan karena didalam perspektif ulama mengambil *fee* dan *bouwherr* itu tidak boleh. Atas dasar itulah kemudian melahirkan satu slogan yaitu Perbaikan Politik Aceh.

Dalam ideologi yang dibawa, Partai Adil Sejahtera masuk kedalam tipologi integralistik yang dimana menganggap bahwa negara dan agama adalah hal yang menyatu dan tidak dapat dipisahkan. Kecenderungan dalam berpolitiknya juga mengikuti gaya berpolitik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga masuk kedalam tipologi integralistik. Dalam pemilihannya pada 2024, Partai Adil Sejahtera menyatakan dukungannya kepada pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang dimana memiliki koalisi NasDem, PKS, dan PKB, hal tersebut dinyatakan oleh ketua umumnya yakni Tu Bulqaini. Hal tersebut menunjukkan semakin jelas arah perpolitikan dari Partai Adil Sejahtera.

Partai Adil Sejahtera Partai yang berlambangkan perahu berwarna emas dengan latar berwarna hijau tersebut memiliki tujuannya tersendiri terhadap sikap politik mereka. Semua tujuan tersebut tergambarkan pada lambang partai mereka yang memiliki makna tersendiri. Warna Hijau pada lambang PAS Aceh merupakan simbol kemakmuran dan kesejahteraan. Juga merupakan warna kesukaan Rasulullah Saw. Selain itu, hijau juga merupakan warna pakaian penduduk syurga sebagaimana disebutkan dalam Alquran surah Al-Insan ayat 21. Selanjutnya makna “Bintang Delapan”, merupakan identitas masyarakat muslim dan simbol kejayaan Islam. Juga menunjukkan syurga delapan. Perjuangan PAS Aceh ingin mengantarkan ummat kepada kejayaan dan kesejahteraan di dunia dan meraih syurga di akhirat. Sedangkan makna “Perahu di Dalam Bintang Delapan”, kata Tu Bulqaini, bahwa Perahu di dalam Bintang Delapan dinamakan dengan *Safinatussalamah wannajah* dan ditulis dengan tulisan Arab dan warna keemasan. Perahu ini, perumpamaan PAS sebagai kendaraan perjuangan. Dan warna emas menunjukkan tujuan penting yang ingin diraih melalui perjuangan politik yang

Rahmatan lil 'alamiin. Tu Bulqaini juga menjelaskan bahwa Partai Adil Sejahtera Aceh dibawah lambang ditulis dengan tulisan Arab-Jawi atau Arab-Melayu “Ini bermakna bahwa PAS Aceh sebagai partai politik sangat peduli kepada khazanah peradaban Islam warisan endatu bangsa Aceh. PAS Aceh memahami bahwa tulisan Arab-Jawi atau Arab-Melayu diciptakan oleh para ulama di Aceh dan berkembang di dunia Melayu haruslah dilestarikan oleh bangsa Aceh”. Tu Bulqaini melanjutkan bahwa makna “Empat tiang di atas perahu” menunjukkan empat mazhab yang menjadi pegangan dalam menjalankan hukum-hukum dalam agama Islam di Aceh yang *Ahlusunnah wal Jama'ah* dan dengan salah satu tiang paling tinggi menunjukkan kepada Mazhab Imam Syafi'i yang merupakan Mazhab Mayoritas masyarakat Aceh. “Makna perahu ini menunjukkan bahwa PAS Aceh sebagai wadah perjuangan politik masyarakat Aceh siap melaju mengantarkan ummat melewati berbagai badai yang menghadang perjuangan dengan menjadikan para ulama sebagai penunjuk arah perjuangan politik”, ujar Tu Bulqaini.

Adapun strategi-strategi Partai Adil Sejahtera sebagai partai baru untuk mendapatkan suara dalam pemilihan umum mendatang yaitu mempromosikan partai dengan cara terjun langsung dengan masyarakat sehingga dapat terjalin interaksi sosial. Cara ini dinilai ampuh dalam meyakinkan masyarakat untuk terjun langsung di lingkungan baik secara door to door maupun face to face. Kunci keberhasilan pada suatu partai dalam mendapatkan suara ialah rutin melakukan kunjungan dan mempromosikan program kerja yang akan diangkat kepada masyarakat, khususnya pada daerah pemilihan tersebut. Sehingga dapat

menjalin interaksi dialog kepada masyarakat, membangun jaringan dalam bentuk massa, sehingga menarik simpati masyarakat untuk memberikan suaranya.

Cara lain yaitu dengan melakukan mobilisasi massa, optimalisasi koalisi, pengembangan dan pemberdayaan politik, serta komunikasi politik. Untuk dapat menarik ke-anggotaan unsur yang di bawaikan juga mengenai keislaman sehingga dapat menjangkau berbagai kalangan pemilih pemula. Mobilisasi massa juga dapat mengurangi rasa ketegangan sosial yang muncul oleh kelompok lain yang dikerahkan, dan untuk dapat mengelaborasi program dalam hal memperoleh suara bagi kandidat juga untuk membangun struktur kelompok yang dapat dijadikan referensi bagi kandidat. Hal ini berupaya untuk memastikan posisi yang lebih baik dalam mobilisasi politik. Sebagai upaya yang telah ditujukan pada usaha-usaha kandidat dalam menggerakkan pemilih agar dapat melakukan tindakan politiknya berupa peraihan dukungan pemilih.

Selain itu juga dilakukan strategi yang namanya pemasaran politik, pemasaran politik dapat dilakukan dengan menggunakan langkah yang strategis dalam penyampaian dapat digunakan sebagai muatan ide dan juga gagasan politik agar masyarakat tidak buta dengan informasi politik. Sehingga rakyat akan mudah memahami dan mempertimbangkannya. Kegiatan ini dapat berupa memasarkan visi dan misi, ideologi, program, dan identitas para kontestan politik yang akan mengikuti pemilihan umum. Strategi pemasaran politik ini harus dilaksanakan secara maksimal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, untuk dapat menjembatani kesenjangan antara pemasaran dan politik ("Partai Adil Sejahtera Aceh," 2022).

Dengan hadirnya Partai Adil Sejahtera ini sebagai partai baru, banyak warga yang mengharapkan partai tersebut untuk terbuka. Partai yang terbuka dianggap sebagai wadah oleh masyarakat untuk menampung pluralitas bagi bangsa Indonesia, melalui representasi pilar-pilar kebangsaan dan kenegaraan sebagai bagian Muslim yang moderat. PAS menyadari bahwa untuk memenangkan persaingan politik tersebut tidak terlepas dari strategi politik yang terbuka. Strategi politik terbuka dalam sistem politik demokrasi di Indonesia telah menjadi prasyarat penting dalam membangun pramatisme politiknya. Hal ini menjadi daya magnet bagi masyarakat pemilih untuk kemudian mendukung dan memilihnya.

Berdasarkan hal tersebutlah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pandangan dan pemikiran pimpinan Partai Adil Sejahtera wilayah kota Lhokseumawe terhadap politik Islam, dengan judul penelitian **“Konsepsi Politik Islam Menurut Pimpinan Partai Adil Sejahtera Di Kota Lhokseumawe”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disusun di atas, di dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah: Bagaimana pandangan politik Islam menurut pimpinan Partai Adil Sejahtera kota Lhokseumawe?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, peneliti terfokus pada penelitian: Konsep politik Islam menurut pimpinan Partai Adil Sejahtera kota

Lhokseumawe dalam konteks pendirian sebuah partai baru yang berideologi Islam dimana sudah banyak partai Islam berdiri sebelumnya.

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam membuat sebuah penelitian pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Didalam penelitian ini, peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui pandangan politik Islam dari pimpinan wilayah kota Lhokseumawe selaku pemimpin wilayah dari partai yang berlandaskan politik Islam.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin disampaikan peneliti dalam penelitian ini diantaranya, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Manfaat ini menjadi sebagai acuan dan sebagai dasar kepada penelitian berikutnya yang berkaitan dengan politik Islam.
 - b. Penelitian ini juga dapat memperkaya ilmu pengetahuan terkhusus dalam pengetahuan Ilmu Politik.
2. Manfaat Praktis
 - a. Peneliti juga berharap agar penelitian ini dapat memperkuat identitas dan pandangan politik dalam memperjuangkan hak-hak dan nilai-nilai politik Islam
 - b. Penelitian ini juga dapat menumbuhkan rasa kesadaran dan partisipasi dalam berpolitik